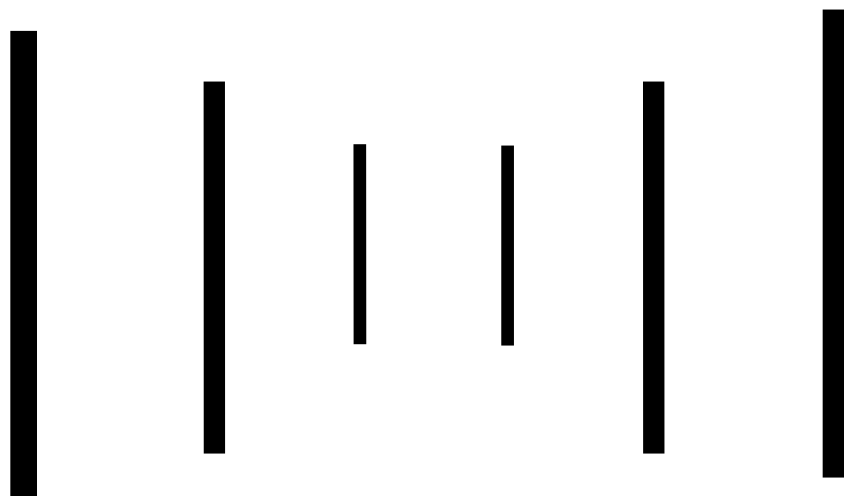




PERUBAHAN RENCANA KERJA



PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga proses penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu juga mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Perubahan terhadap dokumen Renja Tahun 2025 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi pemerintah, dan menyesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan.

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini belumlah sempurna seperti yang diharapkan, untuk itu saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu dalam membuka wawasan sehingga pada saatnya akan dapat memperbaiki kinerja serta penyusunan Rencana Kerja OPD yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya, dan dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam menjalankan proses pembangunan daerah.

Sungailiat, 28 Mei 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bangka,



SAPARUDIN, SE
PEMBINA Tk I / IV b
NIP. 19680210 200604 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2025 merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan satu tahun 2025. Perubahan Renja ini dibuat sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran di atas perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung visi, misi tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Penyusunan perubahan rencana kerja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2025 serta penyerapan anggaran pada rencana kerja sampai dengan triwulan I menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2025 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2025;

Penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2025 dimulai dari pengumpulan data dan analisis permasalahan yang menjadi dasar penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka, Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2025, hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan sampai dengan triwulan I, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada perubahan rencana kerja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyelarasan akhir dengan perubahan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, maka rancangan perubahan renja perangkat dapat ditetapkan oleh kepala perangkat daerah setelah mendapat pengesahan dari Bupati.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2025 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 15);

22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 12);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2025 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I adalah sebagai berikut :

- 1. Dari 2 (dua) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan yang dianggarkan pada Tahun 2025 maka persentase kegiatan yang telah dilaksanakan sudah mencapai target, berdasarkan Laporan Fisik dan Keuangan sampai Maret 2025, serapan keuangan Dinas Perhubungan sudah mencapai 23,70% dari total anggaran sebesar Rp. 11.384.964.772; (sebelas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dan capaian fisik mencapai 22,22%,
- 2. Secara umum kegiatan Renja pada TW I sudah berjalan sesuai dengan target, dimana pada TW I di targetkan sebesar 20 % untuk keuangan dan 25 % untuk fisik. Capaian ini bisa di capai karena proses perencanaan Rencana Anggaran Kerja (RAK) yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan dan arahan beberapa instansi terkait, sehingga tidak banyak pergeseran yang dilakukan, yang memungkinkan belanja rutin bisa berjalan tanpa terhambat.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka TW I sebagai berikut :

TABEL 2.1 REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH PER PROGRAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 TAMBAHAN

NO	PROGRAM	REALISASI (%)			
		KINERJA	KATEGORI*)	KEUANGAN	KATEGORI*)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,20%	SR	27,31%	SR
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	31,25%	SR	20,12%	SR

Table 2.2

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Terhadap RKPD																					
Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka																					
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2025																					
No	Sasaran Strategis Kabupaten	Indikator Sasaran Strategis Kabupaten (IKU)	Target IKU Tahun 2025	Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan			
																		I			
1	2	3	4	5	6					7	8	9		10		11		9			
					2	15							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten (Kategori/Nilai)	BB (72,05)		2	15					URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN			33.533.334.700				11.384.964.772			2.697.929.036
1				Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	27,00	9.585.000.000			26,00	5.660.978.269	0,00		1.546.029.194
												Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	17,00				16,00		0,00		
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%				0,00		0,00		
				Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah								Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70,00				68,00		0,00		
				Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah								Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4				3,00		0,00		
				Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah								Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%				1,00		0,00		
				Meningkatnya Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	2	15	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar (%)	100	255.000.000			100	26.464.045	50,00		14.870.000
												Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar (%)	100				100		0,00		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	15	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	10	155.000.000,00			6	15.584.490	50,00	3	8.870.000
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	15	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	100.000.000,00			4	10.879.555	0,00	0	6.000.000

				Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	2	15	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100	4.905.000.000			100	4.599.595.466	25,00		1.340.457.249
												Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar									
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2	15	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86	4.800.000.000			12	4.584.217.696	25,00	3	1.333.737.249
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	15	01	2	02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	40.000.000			2	5.000.000	0,00	0	-
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	2	15	01	2	02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	26	65.000.000			12	10.377.770	25	3	6.720.000
				Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	2	15	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan	100	325.000.000,00			100	55.200.000	25,00		3.090.000
				Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian								Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100				100		25,00		
				Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								Persentase aparatur yang berkinerja baik	50,00				12,50		0,00		
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2	15	01	2	05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	200.000.000,00			1	10.200.000,00	0,00	0,00	-
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	15	01	2	05	0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Adm inistrasi Kepegawaian	6	25.000.000			11	10.000.000	27,27	3	3.090.000
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2	15	01	2	05	0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	100.000.000			5	35.000.000	0,00	0,00	-
				Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	2	15	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100	375.000.000			100	73.094.877	25,00		2.610.000
												Jumlah Aspek layanan Perangkat Daerah yang di kelola sesuai Peraturan									
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	15	01	2	06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	275.000.000			36	67.794.877	13,89	5	2.610.000
											Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	50.000.000			3	5.300.000	0,00		-

				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	15	01	2	06	0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	50.000.000			0	-	0,00	0		-
				Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	2	15	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	75,00	1.290.000.000			-	65,00	-	0,00		-
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2	15	01	2	07	0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	-			0	-	0,00	0,00		-
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	15	01	2	07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	200.000.000			0	-	0,00	0,00		-
				Tersedianya Mebel	2	15	01	2	07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	220.000.000			0	-	0,00	0,00		-
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2	15	01	2	07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	320.000.000			1	-	0,00	0,00		-
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	15	01	2	07	0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	550.000.000			0	-	0,00	0,00		-
				Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	2	15	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100	1.615.000.000,00			100	704.533.881	25,00			173.621.950
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	15	01	2	08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.250.000.000,00			12	551.654.700	25,00	3		144.326.016
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	15	01	2	08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	160.000.000,00			12	90.000.000	25,00	3		14.475.358
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	15	01	2	08	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	205.000.000,00			12	62.879.181	0,00	3		14.820.576
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	2	15	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	85,00	820.000.000			75,00	202.090.000	25,00			11.379.995
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	15	01	2	09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15,00	475.000.000			15	191.490.000	20,00	3		11.379.995
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2	15	01	2	09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	45.000.000			15	10.600.000	0,00	0		
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	15	01	2	09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	300.000.000			0	-	0,00	0,00		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			13,20			27,31
Predikat Kinerja																			SR			SR

2	MENINGKATNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH	Meningkatnya Konektivitas Transportasi dalam Daerah		Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Layanan Transportasi Umum	2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pesentase Wilayah yang Terlayani Angkutan Umum	66,00	23.948.334.700			-	60,00	5.723.986.503	0,00		1.151.899.842
				Meningkatnya Manajemen Keselamatan Lalu Lintas								Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perengkapan Jalan	80,00					70,00		0,00		
				Meningkatnya Ketersediaan Perengkapan Jalan	2	15	02	2	02		Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Perengkapan Jalan	2000	20.770.334.700				1500	5.453.581.847	0,00		1.132.026.842
				Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Bangka	2	15	02	2	02	0001	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	750	10.920.334.700				16	-	0,00	0,00	-
				Tersedianya Perengkapan Jalan	2	15	02	2	02	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	500.000.000				0	210.000.000	0,00	0,00	-
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	2	15	02	2	02	0003	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4000	9.000.000.000				3242	-	100	3242	1.132.026.842
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	2	15	02	2	02	0004	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4.000	350.000.000				1	5.243.581.847	0,00	0,00	-
				Meningkatnya Pengelolaan Terminal Penumpang	2	15	02	2	03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal yang tersedia	35,00	2.002.000.000				0,00	-	0,00		-
				Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	2	15	02	2	03	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	0	2.000.000				0	-	0,00	0,00	-
				Terbangunnya Gedung Terminal	2	15	02	2	03	0009	Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	2	2.000.000.000				0	-	0,00	0,00	-
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	2	15	02	2	03	0011	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	2	-				0	-	0,00	0,00	-

				Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2	15	02	2	04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Titik Potensi Parkir yang Dikelola	26	20.000.000			0,00	-	0,00		-
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2	15	02	2	04	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1	20.000.000			0	-	0,00	0,00	-
				Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	15	02	2	05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Diuji Secara Berkala	60,00	536.000.000,00			90,00	154.350.000	22,50		6.891.000
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	15	02	2	05	0001	Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3	400.000.000			3	154.350.000	100	3,00	6.891.000
				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2	15	02	2	05	0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	100.000.000			0,00	-	0,00	0,00	-
				Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	2	15	02	2	05	0008	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	36.000.000			0,00	-	0,00	0,00	
				Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2	15	02	2	06		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100	200.000.000			4	35.278.256	1		2.040.000
				Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2	15	02	2	06	0001	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	200.000.000,00			4	35.278.256	25,00	1	2.040.000
				Terlaksananya Persetujuan Hasil Andalalin	2	15	02	2	07		Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Andalalin yang Tersusun	1	85.000.000			1	19.156.400	0,00		1.830.000
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2	15	02	2	07	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1	35.000.000			1	19.156.400	0,00	0,00	1.830.000
				Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	2	15	02	2	07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1	50.000.000			1	-	0,00	0,00	-
				Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2	15	02	2	08		Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1,00	175.000.000,00			2,00	61.620.000	0,00		9.112.000
				Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten	2	15	02	2	08	0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten	1	175.000.000,00			4	61.620.000	25,00	1	9.112.000

[illegible]

Dalam pelaksanaan program/kegiatan tidak semuanya berjalan dengan baik, masih ada permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal yang diluar perkiraan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program /kegiatan Dinas Perhubungan dilihat dari 2 (dua) faktor tersebut adalah:

A. Faktor Internal

- a) Masih terdapat mikomunikasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan perhubungan.
- b) Terdapat 2 kali pergeseran anggaran sehingga menghambat beberapa sub kegiatan karena terjadi pergeseran.

B. Faktor Eksternal

- a. Adanya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berubah;
- b. Sumberdaya manusia yang masih kurang kompetitif.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dalam pencapaian kinerja maka:

1. Koordinasi perlu dilakukan antar Dinas (Pemda) dan Masyarakat, sehingga ada persepsi yang sama agar pembangunan bidang perhubungan dapat tercapai tepat sasaran.
2. Memaksimalkan Aparatur Dinas yang ada, dengan cara melaksanakan tupoksi sesuai latar belakang penempatannya.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Usulan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka dari 2 program, 12 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Dan telah dituangkan dalam tabel Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2025. Dari tiap-tiap program/ kegiatan/ Sub kegiatan dan indikator program/ kegiatan/ Sub kegiatan beserta outputnya dengan kebutuhan anggaran yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Sehingga gambaran program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

TABEL 3.1. REKAPITULASI PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
DAN TOTAL PAGU INDIKATIF

NO	URAIAN	Renja PD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RENJA PD 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG (5-3)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM	2	2	2	0
2	KEGIATAN	19	12	12	7
3	SUB KEGIATAN	43	24	24	19
5	PAGU ANGGARAN	33.533.334.700	11.417.310.455	11.384.964.772	22.148.369.928

Tabel 3.2. Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2025

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (9-7)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			
				SEBELUM	SEKUALAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		DINAS PERHUBUNGAN					33.533.334.700,00	11.417.310.455,00	11.384.964.772,00	- 22.148.369.928,00					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				33.533.334.700,00	11.417.310.455,00	11.384.964.772,00	- 22.148.369.928,00						
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				33.533.334.700,00	11.417.310.455,00	11.384.964.772,00	- 22.148.369.928,00						
1,	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai kinerja pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa	27,00 17,00 0,00 70,00 4,00 100,00	27,00 17,00 0,00 70,00 4,00 100,00	9.885.000.000,00	5.477.426.015,00	5.660.978.269,00	- 1.125.000.000,00						

			Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam kondisi baik												
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar, Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar</i>	-	100 %	255.000.000,00	63.768.300,00	26.464.045,00	- 228.535.955,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	masyarakat	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	18 Dokumen	18 Dokumen	155.000.000,00	36.468.300,00	15.584.490,00	- 139.415.510,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	27.300.000,00	10.879.555,00	-89.120.445,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai standar</i>	100 %	100 %	4.905.000.000,00	4.330.480.365,00	4.599.595.466,00	- 305.404.534,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	masyarakat	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	4.800.000.000,00	4.298.472.355,00	4.584.217.696,00	- 215.782.304,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	15 Laporan	15 Laporan	65.000.000,00	22.008.010,00	10.377.770,00	-54.622.230,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap, Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian, Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	100 %	100 %	625.000.000,00	55.200.000,00	55.200.000,00	- 569.800.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	masyarakat	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	- 189.800.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	20 Orang	1 Orang	400.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	- 365.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah</i>	100 %	100 %	375.000.000,00	110.300.000,00	73.094.877,00	- 301.905.123,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	masyarakat	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	275.000.000,00	105.000.000,00	67.794.877,00	- 207.205.123,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	-44.700.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah	70 %	70 %	1.390.000.000,00	0,00	0,00	- 1.390.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	masyarakat	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	- 500.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	- 100.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	70 Unit	0 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	- 120.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	20 Unit	0 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	- 120.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	0 Unit	550.000.000,00	0,00	0,00	- 550.000.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah</i>	100 %	100 %	1.515.000.000,00	715.587.350,00	704.533.881,00	- 810.466.119,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	masyarakat	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	12 Laporan	1.150.000.000,00	560.688.935,00	551.654.700,00	- 598.345.300,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	160.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	205.000.000,00	64.898.415,00	62.879.181,00	-142.120.819,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik daerah yang dipelihara</i>	80 %	80 %	820.000.000,00	202.090.000,00	202.090.000,00	-617.910.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi	masyarakat	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	15 Unit	15 Unit	475.000.000,00	191.490.000,00	191.490.000,00	-283.510.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	40 Unit	10 Unit	45.000.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	-34.400.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	0 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	- 300.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Penguatan Kapasitas Birokrasi		DINAS PERHUBUNGAN
2,	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan Persentase Wilayah yang terlayani angkutan umum	80,0066,00	80,0066,00	23.648.334.700,00	5.939.884.440,00	5.723.986.503,00	- 6.337.334.700,00						
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Ketersediaan Perlengkapan Jalan</i>	2000 unit	2000 unit	20.770.334.700,00	5.564.622.347,00	5.453.581.847,00	- 15.316.752.853,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur	masyarakat	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													

			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	705 Unit	0 Unit	10.920.334.700,00	0,00	0,00	- 10.920.334.700,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100 Unit	20 Unit	500.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	- 290.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan													

			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4000 Unit	0 Unit	9.000.000.000,00	0,00	0,00	- 9.000.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan													
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4000 Unit	4000 Unit	350.000.000,00	5.354.622.347,00	5.243.581.847,00	4.893.581.847,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur		DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	<i>Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C</i>	65 %	35 %	1.502.000.000,00	0,00	0,00	- 1.502.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur	masyarakat	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C													
			<i>Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun</i>	1 Dokumen	0 Dokumen	92.000.000,00	0,00	0,00	-92.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang													

			<i>Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang</i>	1 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	- 1.000.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)													
			<i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara</i>	2 Unit	0 Unit	410.000.000,00	0,00	0,00	- 410.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<i>Jumlah Titik Potensi Parkir yang Dikelola</i>	2 Titik	2 Titik	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur	masyarakat	DINAS PERHUBUNGAN

												Produksi melalui Peran Aktif Koperasi			
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Persentase Kendaraan Bermotor yang Diuji Secara Berkala</i>	99 %	99 %	736.000.000,00	165.262.093,00	154.350.000,00	- 581.650.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur	masyarakat	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.02.2.05 .0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>	3 Unit	3 Unit	300.000.000,00	165.262.093,00	154.350.000,00	- 145.650.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Jelitik	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05 .0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	5 Orang	0 Orang	400.000.000,00	0,00	0,00	- 400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05 .0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													

			<i>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	1 Laporan	1 Laporan	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</i>	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	80.000.000,00	35.278.256,00	- 164.721.744,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur	masyarakat	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	80.000.000,00	35.278.256,00	- 164.721.744,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur		DINAS PERHUBUNGAN

												Produksi melalui Peran Aktif Koperasi			
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Andalalin yang Tersusun</i>	-	1 Dokumen	85.000.000,00	30.000.000,00	19.156.400,00	-65.843.600,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur	masyarakat	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin													
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin</i>	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	0,00	19.156.400,00	-15.843.600,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur		DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin													
			<i>Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi</i>	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>	1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	100.000.000,00	61.620.000,00	- 113.380.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur	masyarakat	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota													

			<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</i>	1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	100.000.000,00	61.620.000,00	- 113.380.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Angkutan Umum yang Tersedia</i>	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur	masyarakat	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	1 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur		DINAS PERHUBUNGAN

												Produksi melalui Peran Aktif Koperasi			
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan Perdesaan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur	masyarakat	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur		DINAS PERHUBUNGAN

												Produksi melalui Peran Aktif Koperasi			
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan Perdesaan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur	masyarakat	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur		DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan</i>	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur	masyarakat	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
			<i>Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	1 Unit	0 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Tarif Angkutan yang Sesuai Ketentuan</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur	masyarakat	DINAS PERHUBUNGAN

												Produksi melalui Peran Aktif Koperasi			
	2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			<i>Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui	Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur		DINAS PERHUBUNGAN

												Peran Aktif Koperasi			
	J U M L A H					33.533.334.70 0,00	11.417.310.45 5,00	11.384.964.77 2,00	- 22.148.369.92 8,00						

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2025. Tujuan penyusunan Perubahan Renja dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2025 serta mengacu pada perencanaan tahun kedua Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Perubahan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian indikator sampai dengan TW I Tahun 2025.

Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2025 sangat terbatas, hanya pada Triwulan IV Tahun 2025, maka perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas untuk semua kegiatan baik kegiatan dalam penetapan maupun perubahan. Sehingga semua kegiatan dapat selesai dilaksanakan sesuai rencana serta memenuhi capaian indikator baik dalam Renstra.

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Renstra namun tidak tercantum dalam renja dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, indikator kinerja telah tercapai pada tahun sebelumnya, adanya penyesuaian nama program dan kegiatan demi keselarasan indikator kinerja maupun perubahan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang tercantum dalam Renja namun tidak terdapat dalam Renstra dimungkinkan dengan kriteria dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD, adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan serta capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan belum terpenuhi.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan Maret Tahun 2025. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

Sangat disadari bahwa Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2025 ini belum sempurna. Sehubungan dengan itu masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Perubahan Renja sangat diharapkan sehingga Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka untuk tahun-tahun selanjutnya akan menjadi lebih baik.

Demikian Perubahan Rencana Dinas Perhubungan ini disusun, terima kasih.

Sungailiat, 28 Mei 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bangka,



SAPARUDIN, SE
PEMBINA Tk I/ IV b
NIP. 19680210 200604 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DINAS PERHUBUNGAN

JL. DIPONEGORO NO. 07 SUNGAILIAT-BANGKA
Telepon. (0717) 8071584 email.perhubunganbangka@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA NOMOR. 800/93 /DINHUB/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dengan Menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka.

Mengingat :

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 15);

- 22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 20);
- 23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA.**
- KESATU : Mengesahkan Tim Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Tahun 2025 dimaksud dalam diktum Kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 27 Mei 2025**

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bangka**



**SAPARUDIN, SE
NIP.196802102006041004**

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR : 800/ 93 /DINHUB/2025
TANGGAL : 27 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	SAPARUDIN, S.E	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
2	ANWAR, S.IP.	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN	KETUA
3	K.IRFAN AFANDI, S.T	KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	WAKIL KETUA
4	RAMDHAN USMAN, S.IP.	KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN	WAKIL KETUA
5	SISKA ANDRIANI, S.IP.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	SEKRETARIS
6	INDRAWATI, S.KM.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
7	MUHAMMAD ULLUM ROSYUDI, A.MD.	BENDAHARA	ANGGOTA
8	ANGGA HIDAYATULLAH EZA, S.SI.	STAFF BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 27 Mei 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bangka



SAPARUDIN, SE
NIP.196802102006041004



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DINAS PERHUBUNGAN

JL. DIPONEGORO NO. 07 SUNGAILIAT-BANGKA
Telepon. (0717) 8071584 email.perhubunganbangka@gmail.com

JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

NO.	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
1	Surat Sekda kepada Kepala PD Permintaan Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2025/input Matriks Rancangan P-Renja ke SIPD	30 April 2025		Bappeda
2	Penyampaian Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2025 kepada Bappeda/ Input Matriks Rancangan P-Renja PD Tahun 2025 ke SIPD	2 – 8 Mei 2025		Seluruh PD
6	SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan P-Renja PD	9 Mei 2025		Bappeda
7	Penyusunan Rancangan P-Renja PD oleh Kepala PD	9 – 23 Mei 2025		Seluruh PD
8	Verifikasi Rancangan P-Renja PD (Matriks) oleh Bappeda	9 Mei 2025		Bappeda
17	Penetapan Perkada tentang P-RKPD Tahun 2025	26 Mei 2025	Minggu ke-4 bulan Mei 2025	Bagian Hukum dan HAM Setda
18	Surat Sekda kepada Kepala PD tentang Penyusunan Ranhir P-Renja PD Tahun 2025	26 Mei 2025		Bappeda
19	Penyusunan Ranhir P-Renja PD Tahun 2025	27 Mei – 9 Juni 2025	Diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Seluruh PD
20	Penyampaian Ranhir P-Renja PD Tahun 2025 ke Bappeda	10 Juni 2025		Seluruh PD
21	Verifikasi Ranhir P-Renja PD Tahun 2025 oleh Bappeda	10 – 13 Juni 2025	Paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Bappeda
22	Penyusunan Ranperkada P-Renja PD Tahun 2025	16 Juni 2025		Bappeda
23	Penyampaian seluruh Ranhir P-Renja PD kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan melalui Perkada	18 Juni 2025		Bappeda
24	Penetapan Perkada tentang P-Renja PD Tahun 2025	20 Juni 2025	Paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada P-RKPD ditetapkan	Bagian Hukum dan HAM Setda

TABEL VERIFIKASI TARGET INDIKATOR SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, DAN KEGIATAN
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA

NO	SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN		REALISASI/CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET 2025 DI RENSTRA PD 2024- 2026	TARGET 2025 DI RENJA PD TAHUN 2025	TARGET 2025 DI P-RENJA PD TAHUN 2025
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN				42,17			
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	27,00		61,44		27,00	
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	17,00				17,00	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%				0,00	
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	70,00				70,00	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4				4,00	
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%				100,00	
	Meningkatnya Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar (%)	100		89,93	100%	100	100

			Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar (%)	100			100%	100	100
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	10	dokumen	86,85	18 Dokumen	18 dok	18 dok
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	laporan	94,72	1 laporan	1 laporan	1 laporan
	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100		92,44	100%	100	100
			Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar			92,40	100%		
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86		88,66	34 Orang/bulan	86 orang	86 orang
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	dokumen	98,77	12 Dokumen	12 dok	12 dok
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26	laporan	8,93	42 Laporan	15 Laporan	15 laporan
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Kelengkapan Atribut Pegawai	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	100			55,56%	100	100%

	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100			100%	100	
	Meningkatnya Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Persentase aparatur yang berkinerja baik	50,00		0,00	100%	12,50	
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	92,70	1 paket	1	1 paket
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	dokumen	0,00	33 Dokumen	6 dok	6 dok
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20		18,77	20 orang	20 orang	1 orang
	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100		19,31	100%	100	100
			Jumlah Aspek layananan Perangkat Daerah yang di kelola sesuai Peraturan			31,13			
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	0,00	36 Laporan	12 laporan	12 lap
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	dokumen	0,36	36 Dokumen	12 dokumen	12 dok
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	dokumen	0,00	36 Dokumen	12 dokumen	12 dok

	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	75,00		0,00	70%	0,70	70
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	0,00	0	1 unit	0
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	unit	100,00	5 unit	6 unit	0
	Tersedianya Mebel	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	paket	0,00	1 paket	70 unit	0
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	unit	101,18	15 unit	20 unit	0
	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	unit	101,93	1 Unit	2 unit	0
	Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100		99,30	100%	100	100
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	96,23	12 Laporan	12 laporan	12 lap
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	51,80	12 Laporan	12 laporan	12 lap
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	69,11	12 Laporan	12 laporan	12 lap
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	85,00		14,25	80%	0,80	80

	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15,00	unit	0,00	20 Unit	15 unit	15 unit
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	unit		45 Unit	40 unit	10 unit
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit		1 Unit	3 unit	0
	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Layanan Transportasi Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pesentase Wilayah yang Terlayani Angkutan Umum	66,00		32,65		66,00	66
	Meningkatnya Manajemen Keselamatan Lalu Lintas		Persentase Ruas Jalan yang Terpasang Fasilitas Perlengkapan Jalan	80,00				80,00	80
	Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Perlengkapan Jalan	2000		90,05		1500	
	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Bangka	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	750	unit	99,67	2000 unit	100 unit	20 unit
	Tersedianya Perlengkapan Jalan	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	unit	0,00	700 unit	2.000	2000
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4000	unit	99,15	4000 unit	4000	0
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4.000	unit	99,86	4000 unit	4000	4.000 unit
	Meningkatnya Pengelolaan Terminal Penumpang	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal yang tersedia	35,00		0,00	3 Unit	0,65	35%

	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	0	dokumen	0,00	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Terbangunnya Gedung Terminal	Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	2	unit	0,00	0	1 unit	0
	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	2	unit	0,00	0	2 unit	0
	Terlaksananya Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Titik Potensi Parkir yang Dikelola	26		0,00		0,00	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2	laporan	0,00	2 titik	2 titik	2 titik
	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Diuji Secara Berkala	60,00		47,05		99,00	99%
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3	unit	89,81	10 unit	3	3 unit
	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	orang	0,00	5 orang	5 orang	0

	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	laporan	0,00	1 Laporan	1 laporan	0
	Terlaksannnya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100		80,60		4	1 lap
	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	laporan	80,60	1 laporan	1 laporan	1 laporan
	Terlaksananya Persetujuan Hasil Andalalin	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Andalalin yang Tersusun	1		65,46		1	1
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Junlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1	laporan	87,20	1 laporan	1	1 laporan
	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1	laporan	32,85	1 laporan	-	1 lap
	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1,00		4,02	1	2,00	1
	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten	1	laporan	39,60	1 laporan	1 laporan	1 laporan

	Meningkatnya Layanan Rute Transportasi Umum	Kegiatan Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Angkutan Umum yang Tersedia	0,00		0,00	0	0,00	0
	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah kabupaten/kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	unit	0,00	1 unit	1 unit	0
	Meningkatnya Layanan Rute Transportasi Umum	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan Perdesaan	0		0,00	100%	0,00	100
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	1	dokumen	0,00	1 dokumen	1 dokumen	1 doku
	Meningkatnya Layanan Rute Transportasi Umum	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Jaringan Trayek Perkotaan dan Perdesaan	0		0,00	33%	0,00	33
	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan	1	dokumen	0,00	1 dokumen	1 dokumen	1 doku
	Meningkatnya Layanan Rute Transportasi Umum	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan	0		0,00	12 bulan	0,00	12 bulan

	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	laporan	0,00	1 Laporan	1 laporan	1 laporan
	Meningkatnya Layanan Rute Transportasi Umum	Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tarif Angkutan yang Sesuai Ketentuan	0		0,00		0,00	
	Terlaksanannya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam Satu daerah Kabupaten	Sub Kegiatan Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Amngkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam Satu daerah Kabupaten	1	dokumen	0,00	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen
	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam Satu daerah Kabupaten	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas ekonomi Angkutan orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam Satu Daerah Kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam Satu daerah Kabupaten	1	dokumen	0,00	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen

Kepala Dinas Perhubungan

Saparudin, SE
NIP.196802102006041004

